

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi Lapang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Negara Indonesia juga menjamin segala warganya menerapkan hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya merupakan sarana dan peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Membahas tentang pengertian pajak, banyak referensi yang memberikan batasan tentang pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Adriani (dalam Sumarsan, 2013:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN negara Indonesia berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Bila pemungutan pajak ditingkatkan, maka secara otomatis penerimaan pajak negara akan bertambah besar, dengan demikian pemerintah akan lebih leluasa dalam membiayai pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Moses Direktorat Jendral Pajak (2013), bila dibandingkan dengan jenis pajak pusat yang lain misal saja Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atau saudara sekandung yaitu PPN atas transaksi pemanfaatan/penyerahan barang/jasa kena pajak, jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) memang kurang populer bagi kebanyakan orang. Sebenarnya PPN KMS ini hampir 20 tahun sejak tahun 1994 sudah dijadikan satu pasal tersendiri dalam perubahan yang pertama kali atas Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 yaitu pasal 16C. Pada Tahun 1994 dalam perubahan Undang-Undang PPN pada pasal 16C disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh menteri keuangan.

PPN KMS beberapa kali telah dilakukan perubahan terkait peraturan pelaksanaan PPN KMS. Hingga perubahan yang terakhir yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010. Tujuan semua perubahan tersebut

yaitu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban PPN atas KMS.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kewajiban PPN atas KMS yang kurang merupakan resistensi bagi wajib pajak. Bagaimana masyarakat ingin membayar apabila belum mengenal pajak PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Terlepas dari permasalahan sosialisasi pelaksanaan Kegiatan Membangun Sendiri yang dikenakan PPN harus terus berjalan, kerjasama dengan pemerintah daerah juga perlu dilakukan guna memaksimalkan penerimaan pendapatan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak .

Studi ini tidak lepas dari penelitian yang dilakukan oleh Sofiyani Yen Maras, Wilopo dan Eko Supritno pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)” studi kasus pada KPP Pratama Malang Utara yang bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak PPN KMS di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Malang Utara masih sangat kurang, karena tidak adanya target penerimaan pajak. Padahal banyaknya potensi pajak dari jumlah IMB di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara.

Disamping itu juga dari penelitian oleh Ahlisia Karma, Sri Mangesti Rahayu dan Timotius Jositrianto pada tahun 2014 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Pertamabahan nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri” studi kasus pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Batu yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alur pelaksanaan Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa berdasarkan analisis penerimaan pencapaian target dari tahun ke tahun semakin tinggi dan penerimaan PPN atas KMS dari tahun 2011-2013 kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang yakni kurang dari 10%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dengan judul : “Kewajiban Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.
2. Untuk mengetahui dan mengamati bagaimana kontribusi Penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan Kegiatan Membangun Sendiri guna meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi:

2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan Kegiatan Membangun Sendiri guna meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup adalah pembahasan suatu masalah yang dimaksud pembahasan tidak terlalu luas dan dapat difokuskan pada pokok pembahasan. Penulisan laporan tugas akhir ini dibatasi hanya pada pelaksanaan pemungutan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan kontribusi penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri terhadap penerimaan PPN pada tahun 2013-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, begitu pula dalam studi lapang ini. Penulisan tugas akhir ini diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

A. Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip sehingga mendukung pengumpulan data yang berhubungan dengan dasar-dasar perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa buku-buku, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

B. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data tentang kontribusi penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri terhadap penerimaan PPN pada tahun 2013-2016. Pengumpulan data diambil dari Seksi OC (*Operator Console*) dan Server. Data tersebut berguna untuk mengetahui informasi dan sebagai bukti dalam Studi Lapangan.

C. Interview (Wawancara)

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten memberikan objek studi lapangan. Dalam studi lapangan ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Seksi Ekstentifikasi.

2. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data pada penulisan ini dilakukan dengan cara menganalisis data kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri terhadap Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang telah dikumpulkan menjadi satu kesimpulan yang berdasarkan fakta.

1.6 Jadwal Studi Lapang

1. Jadwal Pelaksanaan Studi Lapang

Studi Lapang ini akan dilaksanakan pada saat Semester Ganjil yang berlangsung tanggal 1 Januari 2018-28 Februari 2018.

2. Tempat Studi Lapang

Studi Lapang ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

3. Alamat Studi Lapang

Jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya.

4. Peserta Pelaksana Studi Lapang

Nama : Anita Nofikrestanti

Npm : 1510400986

Progam Studi : Diploma Tiga Manajemen Perpajakan

Jurusan : Manajemen Perpajakan

Alamat : Jalan Pucangan Gang IX No. 34 Surabaya

Email : Anita.nofikrestanti08@gmail.com

No. HP : 085735534760